



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA
TATA NASKAH KEPEGAWAIAN
TAHUN 2017



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2017

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA TATA NASKAH KEPEGAWAIAN
PNS SE-JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 18 Juli Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

• **Gambaran Umum**

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian merupakan sebuah subsistem yang memiliki banyak kegunaan terutama bagi instansi pemerintah, dikarenakan seluruh proses kegiatannya selalu berhubungan dengan proses administrasi kepegawaian, seperti halnya BKD Provinsi Jawa Tengah

Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM.

Dan pada tahun 2009 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengembangkan sebuah sistem pengelolaan kepegawaian yang diberi nama SAPK (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian) sebagai suatu sistem pengelola data kepegawaian PNS seluruh Indonesia dan mengharuskan seluruh proses pengelolaan kepegawaian di tingkat pusat maupun daerah menggunakan sistem tersebut.

Jika dibandingkan dengan Simpeg Pemerintah Daerah yang telah menjadi sebuah sarana vital dalam proses pengelolaan kepegawaian, SAPK merupakan sistem

'baru' yang bahkan sampai dengan saat ini belum mampu memenuhi keberagaman kebutuhan informasi kepegawaian yang ada di daerah seperti halnya Simpeg.

Oleh karena itu, sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Sistem Aplikasi e-File yang merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola dokumen kepegawaian baik tekstual maupun digital seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ke depan digunakan untuk proses kepegawaian secara *paperless*.

Aplikasi e-File Kepegawaian mempunyai misi seluruh proses kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara *paperless*, dan untuk ke depan seluruh dokumen kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota akan sinkron dengan aplikasi DMS (Document Management System) BKN.

Guna Mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2015 BKD Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan Sharing Aplikasi e-File untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diharapkan agar seluruh Kabupaten/Kota dapat menyamakan persepsi pengelolaan dokumen kepegawaian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan BKD Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi e-File tersebut dengan dasar dan pedoman dari BKN.

BKN Pada Tahun 2018 memang merencanakan akan membuat sebuah sistem portal dokumen kepegawaian seluruh PNS di Indonesia, dengan harapan seluruh dokumen kepegawaian PNS seluruh Indonesia sudah tercover secara digital, dan seluruh proses kepegawaian bisa dilaksanakan secara *paperless*, agar lebih mempercepat proses administrasi kepegawaian.

Guna mengoptimalkan hal tersebut, perlu dikembangkan sebuah sistem dengan mekanisme yang dapat mengampu seluruh perbedaan dan permasalahan yang ada terutama dalam hal pengelolaan dokumen kepegawaian menjadi dokumen digital yang dimiliki oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Pengembangan Aplikasi e-File Kepegawaian se-Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengelola seluruh dokumen kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui pengembangan aplikasi nantinya akan sinkron dengan Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

2. Tujuan

- a. Terselenggaranya kelancaran pengelolaan data PNS se-Jawa Tengah yang bersumber baik dari Simpeg atau data akhir SAPK BKN untuk diolah menjadi data pada aplikasi e-File Kepegawaian se-Jawa Tengah.

- b. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data dan dokumen kepegawaian PNS antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan *up-to-date*;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian ini akan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke Kabupaten / Kota maupun penyelenggaraan rapat koordinasi pengelolaan data kepegawaian dengan mengundang pengelola kepegawaian Provinsi / Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian Kabupaten / Kota sejumlah 35 Kabupaten/Kota dan para pengelola kepegawaian Provinsi Jawa Tengah sejumlah 59 SKPD dengan harapan tercapainya sebuah mekanisme dan updating pengelolaan dokumen kepegawaian secara digital pada Aplikasi e-File Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung guna pengelolaan administrasi kepegawaian se-Jawa Tengah secara paperless.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian se-Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

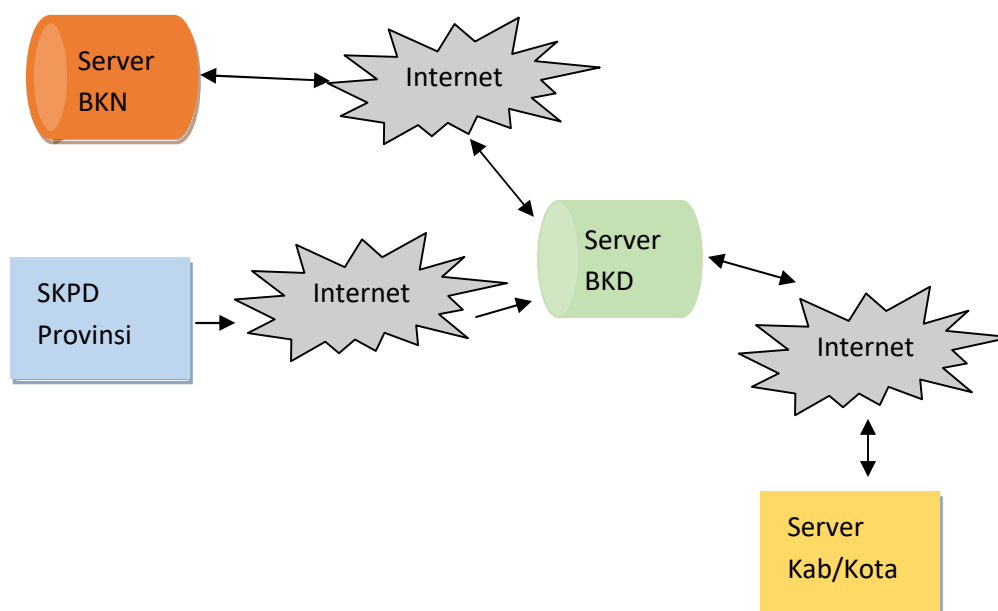
F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2017											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK			■					■				
2	Rapat Koordinasi					■				■			
3	Konsultasi/Koordinasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Belanja Pengembangan Aplikasi			■									

G. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pengembangan e-File Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah adalah terciptanya sebuah mekanisme *updating* data dokumen Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan dukungan pelaksanaan :

1. Pengembangan Aplikasi e-File Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan memanfaatkan data Simpeg atau data akhir SAPK BKN sebagai sumber data dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Identifikasi kebutuhan;
 - Penyusunan hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak;
 - Dukungan interkoneksi dan interoperabilitas, mampu berintegrasi dan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.
 - Penerapan dan pemberlakuan uji coba sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik;
 - Penentuan tim yang akan mengerjakan, termasuk tugas dan tanggungjawab masing-masing;
 - Penyediaan fasilitas terkait yang dibutuhkan selama kegiatan;
 - Penyusunan tahapan pekerjaan dan hasil yang didapat dari tiap tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah merujuk kepada metode dan teori perancangan dan pembangunan suatu aplikasi;



Bagan hasil pengembangan Aplikasi e-File Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah

2. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan mengundang para pengelola data kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagai sarana koordinasi dalam mencapai tujuan.

3. Inventarisasi ketersediaan sumber daya yang telah ada serta kebutuhan dan permasalahan dengan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke Kabupaten/Kota.

H. ANGGARAN

Perkiraan kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah Tahun 2017.

Semarang, 29 Pebruari 2016

**KEPALA BIDANG DOKLAHTA
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. S. PUDJI TJAHYONO, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19601020 198603 1 015